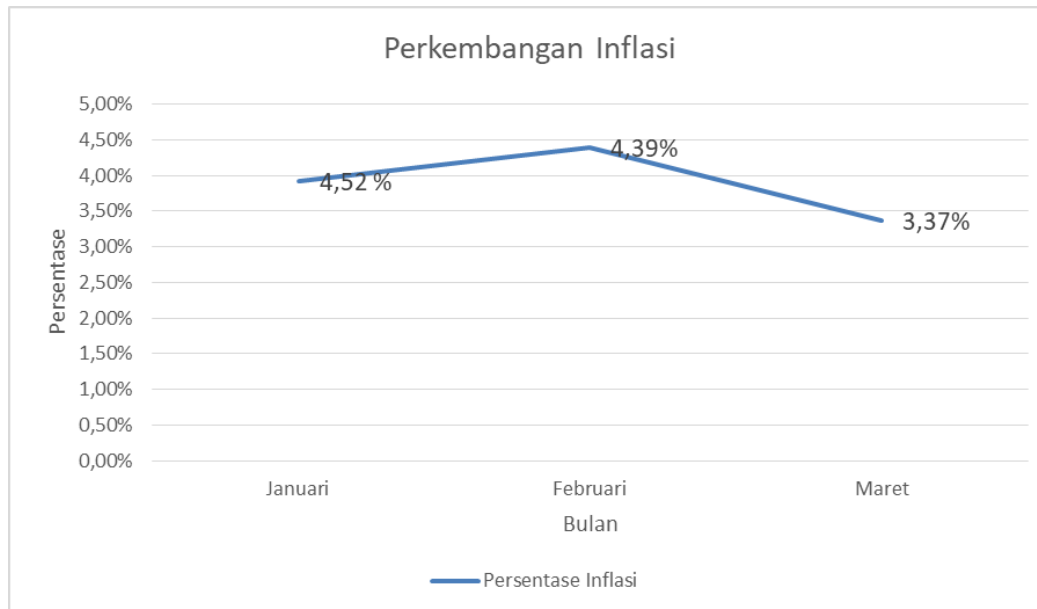


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indeks inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga berbagai komoditas di Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat pada minggu pertama bulan Januari sebesar 3,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,75. Secara *month to month* (m-to-m), Provinsi Sumatera Barat bulan Januari 2026 mengalami deflasi sebesar -1,15%. Adapun penyebab deflasi -1,15% karena deflasi *volatile food* (cabai, bawang) serta penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Pada Februari 2026 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,39% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,45. Secara *month to month* (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,30%. Hingga Februari 2026, inflasi *year to date* (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,85%.

Laju inflasi tahunan *year-on-year* (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,04% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara *year on year* (y-on-y) terjadi inflasi sebesar 3,37% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,49. Peningkatan ini dipicu oleh kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan komoditas penyumbang yaitu Daging ayam ras (3,35%), jengkol (22,24%), ikan tongkol (8,94%), dan bensin (0,68%).

Secara keseluruhan, pada triwulan I ini terjadi fluktuasi inflasi *year on year* Sumatera Barat yang cukup signifikan, dimana pada bulan februari terjadi kenaikan inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,30%, sedangkan pada bulan Maret inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,04%. Tingkat inflasi yang cenderung terkendali ini terjadi karena pengaruh intervensi pemerintah dan upaya pengendalian harga yang dilakukan selama periode

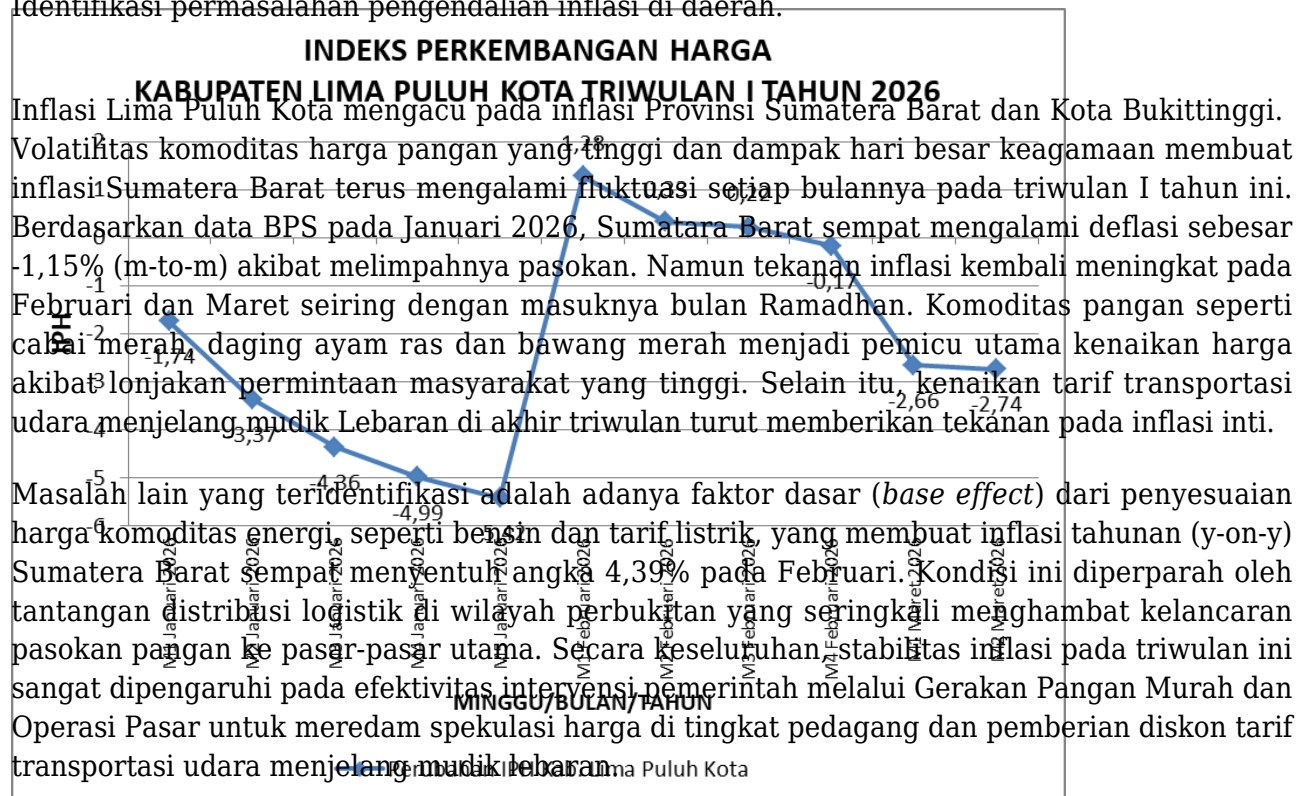
Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), melaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah dan melakukan Sidak Pasar sehingga berhasil menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis). Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari - Maret 2026, Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (y-to-d) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Disamping itu, Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Lima Puluh Kota pada triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah :

INDEKS PERKEMBANGAN HARGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TRIWULAN I TAHUN 2026		
No	Minggu/Bulan/Tahun	IPH Kabupaten Lima Puluh Kota
1	M1 Januari 2026	-1,74
2	M2 Januari 2026	-3,37
3	M3 Januari 2026	-4,36
4	M4 Januari 2026	-4,99
5	M5 Januari 2026	-5,42
6	M1 Februari 2026	1,28
7	M2 Februari 2026	0,33
8	M3 Februari 2026	0,22
9	M4 Februari 2026	-0,17
10	M1 Maret 2026	-2,66
11	M2 Maret 2026	-2,74

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dinamis. Lonjakan tertinggi terjadi pada minggu ke - 2 sebesar 1,28 dengan persentase kenaikan dari minggu sebelumnya sebesar 6,7%. Namun pada minggu berikutnya IPH dapat diminimalisir hingga terjadi penurunan di minggu ke 2 Februari sampai berakhirnya Triwulan 1 tahun 2026 ini. Adapun langkah - langkah yang dilakukan TPID yaitu melakukan Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah hingga sidak pasar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.



3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif (4K) adalah strategi yang dilaksanakan untuk pengendalian inflasi daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- a. Pemantauan dan pelaporan harga setiap hari melalui SP2KP dan Web Panel Harga dan pelaporan berkala ke Irjen Mendagri oleh OPD Terkait.
- b. 11 Maret 2026, Dinas Perdagangan melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah
- c. 13 Maret 2026, Dinas Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah menjelang Natal dan Tahun Baru dalam rangka menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Menghadapi Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 1447 H.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. 17 Januari 2026, Bupati Lima Puluh Kota menyerahkan bantuan traktor roda 4 roda 4, combine harvester, pompa air, hand sprayer, serta 75 ton benih padi untuk 3000 hektar
- b. 7 Februari 2026, Bupati Lima Puluh Kota bersama masyarakat melakukan Panen di Sawah Harapan.
- c. 9 Februari 2026, Bupati Lima Puluh Kota bersama masyarakat Jorong I Nagari Koto Bangun melakukan Panen Sawah.
- d. 18 Maret 2026, Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota bersama beberapa Kepala OPD dan unsur Forkopimda turun langsung ke Pasar Sarilamak serta sejumlah pusat grosiran di Tanjung Pati.

3. Komunikasi Efektif

- a. Rapat Teknis dan Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 setiap minggunya bersama Kementerian Dalam Negeri melalui *Zoom Meeting*.
- b. Update harga komoditi bahan pokok setiap hari di aplikasi informasi harga barang pokok dengan alamat <https://dev-inflasi.limapuluhkotakab.go.id/>.
- c. 13 Februari 2026, Bagian Perekonomian dan SDA melaksanakan HLM TW I guna mengantisipasi potensi peningkatan inflasi menjelang dan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar/Pasar Murah pemerintah memperluas akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memberikan kepastian harga (keuntungan) bagi petani lokal atas hasil panen mereka.
2. Melakukan pemantauan (sidak) ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap regulasi harga (HET), mencegah praktik penimbunan, serta menjamin ketersediaan stok di tingkat pengecer.
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin dan *High Level Meeting* untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, menyelaraskan program antar-pemangku kepentingan dan mencari solusi yang komprehensif atas kendala di lapangan.
4. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bulog dalam menyikapi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada komoditas spesifik seperti Cabai Merah, Bawang Merah, dan Beras.

Mitigasi Faktor Non-Pangan: Penurunan harga emas perhiasan pada Maret 2026 juga

5.

turut membantu menahan laju inflasi dari kelompok pengeluaran lainnya, melengkapi efektivitas intervensi pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan, termasuk gerakan menanam cabai secara masif untuk menekan inflasi serta mendukung ketersediaan bahan baku program makan bergizi gratis dari hulu ke hilir.
2. Mengembangkan ekonomi lokal demi kemandirian Nagari dengan mendorong pertumbuhan IKM berbasis digital, meningkatkan daya saing investasi teknologi, serta mempercepat akses pembiayaan perbankan bagi UMKM dan sektor primer.
3. Mengoptimalkan perdagangan antar-daerah dengan memanfaatkan surplus komoditas melalui perbaikan infrastruktur jalan dan gudang guna meningkatkan efisiensi serta menekan biaya logistik.
4. Menjaga stabilitas harga melalui pemantauan rutin, sidak pasar, dan Gerakan Pasar murah (TTIC & Bulog), yang didukung oleh pengawasan ketat bersama Satgas Pangan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan inflasi.
5. Memperkuat koordinasi antar-instansi dan memastikan alokasi anggaran perangkat daerah yang tepat sasaran guna menjamin kelancaran pasokan serta distribusi barang secara optimal.
6. Mengembangkan destinasi wisata unggulan yang kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional.